

Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama dan Implikasinya terhadap Pemilih Nahdliyin pada Pilpres 2024 di Kota Depok

Udoh Mafudoh^{1*}, Mohamad Abduh², Sri Rumiati³

¹*SMP Arrahman Kota Depok, Indonesia*

^{2,3}*STKIP Arrahmaniyah Depok, Indonesia*

Abstrak—Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki pengaruh sosial dan politik yang signifikan, terutama melalui peran elite keagamaannya di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika dan perilaku politik elite NU serta implikasinya terhadap perilaku pemilih nahdliyin pada Pemilihan Presiden 2024 di Kecamatan Cipayang Kota Depok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari elite NU struktural, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik elite NU pada Pilpres 2024 bersifat cair, plural, dan tidak monolitik. Secara organisatoris NU tetap berpegang pada khittah sebagai organisasi sosial-keagamaan, namun secara personal elite NU terlibat dalam politik elektoral melalui dukungan informal, jaringan politik kandidat, legitimasi simbolik keagamaan, serta pemanfaatan media digital. Fragmentasi sikap politik elite NU berimplikasi pada perilaku pemilih nahdliyin yang semakin rasional dan mandiri, khususnya di wilayah urban. Elite NU tidak lagi menjadi penentu tunggal pilihan politik, melainkan berperan sebagai referensi moral dalam pembentukan preferensi politik masyarakat.

Kata kunci:

Elite NU,
Pemilih nahdliyin,
Perilaku politik,
Pilpres 2024.

Histori:

Dikirim: 13 Januari 2026
Direvisi: 18 Maret 2026
Diterima: 20 Maret 2026
Online: 26 Maret 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Mafudoh, U., Abduh, M., & Rumiati, S. (2026). Perilaku Politik Elite Nahdlatul Ulama dan Implikasinya terhadap Pemilih Nahdliyin pada Pilpres 2024 di Kota Depok. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(1), 111-121.

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi menentukan arah kepemimpinan nasional

^{1*}Corresponding author.

E-mail: mahfudohai@gmail.com

sekaligus mencerminkan dinamika partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks demokrasi elektoral, perilaku pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh partai politik dan kandidat, tetapi juga oleh berbagai aktor sosial yang memiliki legitimasi moral dan pengaruh kultural di masyarakat. Organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), merupakan salah satu aktor sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik dan perilaku politik masyarakat (Aminuddin, 2020).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki jaringan sosial yang luas yang mencakup pesantren, majelis taklim, serta berbagai organisasi sosial keagamaan di tingkat lokal. Dengan basis massa yang besar dan jaringan kultural yang kuat, NU seringkali menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik nasional maupun lokal (Noer, 2018). Pengaruh tersebut terutama terlihat melalui peran elite keagamaan seperti kiai, pengurus organisasi, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral di lingkungan nahdliyin. Elite NU tidak hanya berperan dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga seringkali terlibat dalam proses pembentukan preferensi politik masyarakat melalui ceramah, forum keagamaan, maupun jaringan sosial yang dimiliki.

Dalam konteks politik kontemporer, hubungan antara agama dan politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas demokrasi serta membentuk wacana politik publik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa organisasi Islam besar seperti NU memiliki peran strategis dalam membangun moderasi beragama serta menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan praktik demokrasi di Indonesia (Widia, 2025; Susanti, 2024). Dalam proses tersebut, elite keagamaan berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan politik dengan nilai-nilai moral masyarakat.

Keterlibatan elite NU dalam politik tidak terlepas dari karakter historis organisasi ini yang memiliki hubungan dinamis dengan kekuasaan politik. Sejak masa awal kemerdekaan, NU pernah terlibat langsung dalam politik praktis melalui Partai NU, sebelum kemudian menegaskan kembali posisinya sebagai organisasi sosial-keagamaan melalui kebijakan Khittah NU 1984. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa NU secara organisatoris tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, namun tetap memberikan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai warga negara (Noer, 2018). Dalam praktiknya, kebijakan ini menghasilkan pola keterlibatan politik yang bersifat personal dan kultural di kalangan elite NU.

Perkembangan demokrasi pasca reformasi semakin membuka ruang partisipasi politik bagi berbagai kelompok sosial, termasuk elite keagamaan. Dalam konteks ini, elite NU seringkali memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan aktor politik melalui jaringan sosial yang dimiliki. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa elite keagamaan memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan politik masyarakat melalui otoritas moral dan legitimasi religius yang mereka miliki (Aminuddin, 2020). Selain itu, keterlibatan tokoh agama dalam politik juga sering dipandang sebagai strategi adaptif untuk mempertahankan pengaruh sosial dalam konteks perubahan politik yang semakin kompetitif (Junaedi, 2025).

Dalam Pemilihan Presiden 2024, dinamika keterlibatan elite NU menunjukkan perkembangan yang menarik untuk dikaji. Kontestasi politik yang semakin kompetitif serta meningkatnya penggunaan media digital dalam komunikasi politik telah mengubah pola interaksi antara elite keagamaan dan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan elite NU dalam pemilu tidak lagi bersifat monolitik, melainkan memperlihatkan variasi sikap politik yang dipengaruhi oleh jaringan sosial, preferensi individu, serta dinamika internal organisasi (Saputra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa elite NU tidak selalu memiliki posisi politik yang seragam dalam kontestasi elektoral.

Di tingkat lokal, dinamika tersebut dapat diamati secara lebih jelas melalui interaksi antara elite NU dan masyarakat nahdliyin dalam konteks sosial tertentu. Kecamatan Cipayung di Kota Depok merupakan salah satu wilayah urban yang memiliki karakteristik sosial yang beragam serta tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi. Sebagai wilayah perkotaan dengan heterogenitas sosial dan akses informasi yang luas, masyarakat Cipayung memiliki karakter pemilih yang lebih rasional dan kritis terhadap isu politik dibandingkan dengan masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi ini menjadikan Cipayung sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana elite NU menyesuaikan strategi politiknya di tengah masyarakat urban yang semakin terbuka terhadap berbagai sumber informasi politik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara organisasi keagamaan dan politik di Indonesia. Muzakki (2019) menunjukkan bahwa elite keagamaan seringkali memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan politik dengan aspirasi masyarakat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama di wilayah yang memiliki ikatan sosial dan kultural yang kuat dengan organisasi keagamaan (Hasbullah & Faturrahman, 2021). Namun demikian, beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya perubahan dalam pola hubungan antara elite keagamaan dan masyarakat, terutama di wilayah urban yang memiliki akses informasi politik yang lebih luas (Syamsuddin, 2022).

Meskipun kajian mengenai hubungan antara NU dan politik telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada level nasional atau regional. Penelitian mengenai perilaku politik elite NU pada level mikro-lokal, khususnya di tingkat kecamatan, masih relatif terbatas. Padahal, dinamika politik lokal seringkali memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku pemilih karena kedekatan sosial dan kultural antara elite lokal dan masyarakat. Selain itu, Pilpres 2024 juga menghadirkan konfigurasi politik yang berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya, baik dari sisi koalisi politik, strategi kampanye, maupun penggunaan media digital dalam mobilisasi politik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang berkaitan dengan kajian mengenai dinamika dan perilaku politik elite NU di tingkat mikro-lokal dalam konteks pemilihan presiden terbaru. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dinamika dan perilaku elite NU di Kecamatan Cipayung Kota Depok dalam Pilpres 2024 serta implikasinya terhadap perilaku pemilih nahdliyin. Dengan menggunakan pendekatan mikro-lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi peran elite keagamaan dalam politik elektoral

kontemporer serta kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika dan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penafsiran makna, sikap, serta tindakan sosial aktor yang terlibat dalam dinamika politik lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara kontekstual serta menggali pengalaman dan perspektif informan secara lebih komprehensif (Creswell, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merepresentasikan kawasan urban yang memiliki basis warga nahdliyin cukup signifikan serta dinamika politik lokal yang relatif kompleks. Selain itu, heterogenitas sosial dan tingkat partisipasi politik masyarakat di wilayah ini tergolong tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji relasi antara elite keagamaan dan perilaku pemilih dalam konteks politik elektoral kontemporer. Penelitian dilakukan pada periode pasca Pemilihan Presiden 2024, yang memungkinkan peneliti merekonstruksi dinamika sikap dan perilaku elite Nahdlatul Ulama (NU) sebelum, selama, dan setelah kontestasi politik berlangsung (Moleong, 2019). Subjek penelitian ini adalah elite NU di tingkat lokal yang mencakup pengurus struktural organisasi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial di lingkungan nahdliyin. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, antara lain memiliki posisi struktural atau pengaruh sosial dalam organisasi NU, terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai dinamika politik Pilpres 2024, serta berdomisili atau aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan di wilayah Kecamatan Cipayung (Sugiyono, 2020). Untuk memperluas jangkauan data dan memperkaya informasi, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling, yaitu penentuan informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya (Bungin, 2017). Informan penelitian terdiri atas berbagai kategori, seperti pengurus MWC NU, pengurus ranting NU, kiai atau pengasuh majelis taklim, ustaz atau penggerak dakwah, serta tokoh masyarakat dan aktivis sosial nahdliyin. Seluruh informan diberi kode tertentu guna menjaga kerahasiaan identitas dan menjunjung tinggi etika penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam (in-depth interview) digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta rasionalitas elite NU dalam menentukan sikap politik pada Pilpres 2024. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan mengacu pada tema-tema utama, seperti sikap politik elite NU terhadap Pilpres, bentuk keterlibatan dalam kontestasi politik, relasi dengan kandidat atau aktor politik, serta pengaruh elite NU terhadap pemilih nahdliyin. Setiap wawancara berlangsung antara 45 hingga 90 menit dan dilakukan dalam satu hingga dua kali pertemuan, disesuaikan dengan kedalaman informasi yang diperoleh. Proses wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk

keperluan analisis. Selain itu, observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati aktivitas sosial dan keagamaan yang melibatkan elite NU, seperti pengajian, pertemuan organisasi, dan kegiatan sosial masyarakat, guna memahami konteks interaksi sosial serta mengidentifikasi indikasi keterlibatan politik dalam aktivitas tersebut. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen relevan, seperti dokumen organisasi NU, arsip media massa, pernyataan sikap elite NU, serta konten media sosial yang berkaitan dengan dinamika Pilpres 2024, sebagai sumber data sekunder yang memperkuat temuan penelitian (Creswell, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam tema-tema utama, seperti dinamika politik elite NU, bentuk perilaku politik, serta implikasinya terhadap perilaku pemilih nahdliyin. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antar kategori data. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang disertai proses verifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan berbagai sumber data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check (Moleong, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini berupaya memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Elite NU dalam Sejarah Organisasi hingga Pilpres 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik elite Nahdlatul Ulama (NU) pada Pemilihan Presiden 2024 tidak dapat dipahami secara terpisah dari perjalanan historis organisasi ini dalam relasinya dengan politik nasional. Sejak awal berdirinya, NU memiliki hubungan yang dinamis dengan politik, mulai dari keterlibatan langsung dalam politik praktis melalui Partai NU hingga penegasan kembali posisi organisasi melalui kebijakan Khittah NU 1984 yang menempatkan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan (Noer, 2018). Meskipun secara organisatoris NU menegaskan diri sebagai organisasi non-partisan, hasil penelitian menunjukkan bahwa elite NU tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam politik secara personal dan kultural. Hal ini terlihat dari peran elite NU sebagai penghubung antara aspirasi umat dengan aktor politik, terutama dalam momentum politik elektoral seperti Pemilihan Presiden.

Salah satu informan penelitian menjelaskan bahwa keterlibatan elite NU dalam politik tidak selalu dimaknai sebagai keterlibatan organisasi secara struktural, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

“NU sebagai organisasi memang menjaga khittah, tetapi sebagai warga negara kami juga memiliki hak politik. Banyak kiai atau pengurus NU yang ikut memberikan pandangan politik, tetapi biasanya itu atas nama pribadi.”

(Informan I1, Pengurus MWC NU)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa elite NU memisahkan secara tegas antara posisi organisasi dan pilihan politik personal. Pola ini mencerminkan strategi adaptasi elite NU terhadap dinamika politik modern yang semakin kompetitif, sekaligus menjaga legitimasi moral organisasi sebagai lembaga keagamaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam konteks Pilpres 2024, elite NU di Kecamatan Cipayung memperlihatkan dinamika politik yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Tidak terdapat satu sikap politik yang dominan di antara elite NU, melainkan terjadi fragmentasi dukungan politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kedekatan personal dengan kandidat, jaringan politik, serta pertimbangan rasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aminuddin (2020) yang menyatakan bahwa elite keagamaan dalam sistem demokrasi modern cenderung menunjukkan rasionalitas politik yang lebih fleksibel dan pragmatis. Elite NU tidak lagi terikat pada satu pilihan politik kolektif, melainkan memiliki otonomi dalam menentukan sikap politik masing-masing.

Perubahan ini juga berkaitan dengan transformasi struktur sosial masyarakat urban. Kecamatan Cipayung sebagai wilayah urban memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif tinggi. Kondisi tersebut memengaruhi cara elite NU berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks politik.

“Sekarang masyarakat sudah banyak mendapatkan informasi dari media sosial dan media online. Jadi pengaruh tokoh agama tetap ada, tetapi tidak seperti dulu yang langsung diikuti begitu saja.”

(Informan I3, Tokoh Agama)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara elite NU dan masyarakat mengalami perubahan dari pola kepatuhan tradisional menuju relasi yang lebih dialogis. Elite NU tetap memiliki pengaruh moral, tetapi tidak lagi menjadi penentu tunggal pilihan politik masyarakat.

Tabel 1. Dinamika Politik Elite NU pada Pilpres 2024

Aspek Dinamika	Temuan Penelitian
Posisi organisasi	NU tetap menjaga khittah sebagai organisasi sosial-keagamaan
Sikap elite	Elite NU memiliki pilihan politik yang beragam
Pola dukungan	Dukungan politik bersifat personal, bukan organisatoris
Faktor pengaruh	Kedekatan jaringan, rasionalitas politik, dan konteks lokal

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik elite NU pada Pilpres 2024 mencerminkan proses adaptasi organisasi keagamaan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Elite NU tetap memainkan peran politik, tetapi dengan cara yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Bentuk Perilaku Politik Elite NU pada Pilpres 2024

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku politik elite NU pada Pilpres 2024 tidak bersifat tunggal, melainkan menunjukkan variasi bentuk keterlibatan politik. Berdasarkan analisis data wawancara dan observasi, terdapat beberapa pola utama perilaku politik elite NU di Kecamatan Cipayung.

Dukungan Politik Personal

Bentuk perilaku politik yang paling dominan adalah dukungan politik yang bersifat personal. Elite NU memberikan dukungan kepada kandidat tertentu sebagai individu, bukan sebagai representasi organisasi NU.

“Kalau soal pilihan politik biasanya itu pilihan pribadi. Kami tidak pernah membawa nama NU secara organisasi dalam mendukung kandidat.”

(Informan I2, Pengurus Ranting NU)

Pola ini menunjukkan upaya elite NU untuk menjaga netralitas organisasi sekaligus tetap menggunakan hak politik individu mereka.

Peran sebagai Political Broker

Bentuk perilaku kedua adalah keterlibatan elite NU sebagai perantara politik (political broker) antara kandidat politik dengan masyarakat. Dalam posisi ini, elite NU memanfaatkan jaringan sosial dan keagamaan yang dimiliki untuk memperkenalkan kandidat kepada masyarakat.

Elite NU seringkali memiliki jaringan luas melalui pesantren, majelis taklim, dan organisasi sosial keagamaan. Jaringan tersebut menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam proses mobilisasi politik.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Aminuddin (2020) yang menyatakan bahwa elite keagamaan seringkali berfungsi sebagai mediator antara kekuasaan politik dan masyarakat.

Penggunaan Legitimasi Simbolik Keagamaan

Penelitian ini juga menemukan bahwa elite NU menggunakan legitimasi simbolik keagamaan dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Narasi yang digunakan biasanya bersifat normatif, seperti pentingnya memilih pemimpin yang amanah, berakhlak, dan berpihak pada kepentingan umat. Meskipun narasi tersebut tidak selalu menyebut kandidat secara eksplisit, pesan moral yang disampaikan dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai pilihan politik mereka. Temuan ini sesuai dengan teori otoritas simbolik Bourdieu (1991) yang menjelaskan bahwa bahasa dan simbol keagamaan dapat membentuk persepsi politik masyarakat tanpa instruksi langsung.

Pemanfaatan Media Sosial

Perubahan signifikan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik oleh elite NU. Elite NU, terutama generasi muda dan pengurus badan otonom, mulai aktif menggunakan platform digital untuk menyampaikan pandangan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi strategi komunikasi politik elite NU dalam merespons perubahan perilaku pemilih yang semakin aktif di ruang digital (Syamsuddin, 2022).

Tabel 2. Tipologi Perilaku Politik Elite NU

Tipologi Perilaku	Karakteristik
Dukungan personal	Dukungan politik atas nama individu
Political broker	Menjadi penghubung antara kandidat dan masyarakat
Legitimasi simbolik	Menggunakan narasi moral dan keagamaan
Komunikasi digital	Memanfaatkan media sosial dalam komunikasi politik

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku politik elite NU tidak lagi bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai strategi yang menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.

Implikasi Perilaku Politik Elite NU terhadap Pemilih Nahdliyin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik elite NU memiliki pengaruh terhadap pemilih nahdliyin, namun pengaruh tersebut tidak lagi bersifat determinan. Elite NU tetap menjadi referensi moral bagi sebagian pemilih, tetapi keputusan politik pemilih semakin dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Salah satu informan menjelaskan bahwa masyarakat masih menghormati pandangan elite NU, tetapi tidak selalu mengikuti arahan politik mereka.

“Kalau ada kiai atau tokoh NU yang menyampaikan pandangan politik, masyarakat tetap mendengarkan. Tetapi pilihan akhirnya tetap kembali kepada masing-masing individu.”

(Informan I5, Tokoh Masyarakat)

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan dalam relasi antara elite dan pemilih. Jika sebelumnya pemilih cenderung mengikuti arahan elite secara loyal, pada Pilpres 2024 pemilih nahdliyin menunjukkan sikap yang lebih mandiri dan rasional.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori patron–client yang dikemukakan oleh Scott (1972). Dalam pola patron–client tradisional, elite memiliki posisi dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Namun dalam konteks masyarakat urban modern, pola tersebut mulai mengalami perubahan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih nahdliyin di wilayah urban seperti Cipayung semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti media massa, media sosial, dan diskusi politik di ruang publik. Kondisi ini menyebabkan pengaruh elite NU menjadi salah satu faktor di antara banyak faktor lain yang memengaruhi perilaku pemilih.

Temuan ini juga menguatkan penelitian Syamsuddin (2022) yang menunjukkan bahwa masyarakat muslim urban cenderung lebih rasional dan kritis dalam menentukan pilihan politik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa elite NU tetap memiliki peran dalam proses politik, tetapi peran tersebut tidak lagi bersifat dominan. Elite NU lebih berfungsi sebagai referensi moral dan simbolik, sementara keputusan politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor rasional lainnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku politik elite NU pada Pilpres 2024 berada pada irisan antara kontinuitas dan perubahan. Di satu sisi, elite NU tetap memiliki legitimasi moral yang kuat dalam masyarakat. Di sisi lain, perubahan struktur sosial masyarakat menyebabkan pengaruh elite menjadi lebih terbatas. Transformasi ini menunjukkan bahwa relasi antara agama dan politik dalam demokrasi lokal Indonesia mengalami proses adaptasi seiring dengan meningkatnya rasionalitas pemilih dan berkembangnya ruang publik digital

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika dan perilaku politik elite Nahdlatul Ulama (NU) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kecamatan Cipayung Kota Depok mencerminkan pola keterlibatan politik yang bersifat cair, plural, dan kontekstual. Elite NU tidak lagi bertindak sebagai satu kesatuan politik yang monolitik, melainkan menunjukkan fragmentasi sikap politik yang dipengaruhi oleh rasionalitas individu, jaringan sosial, serta dinamika politik lokal. Meskipun NU secara organisatoris tetap berpegang pada khittah sebagai organisasi sosial-keagamaan, elite NU secara personal tetap aktif berpartisipasi dalam politik elektoral melalui berbagai bentuk keterlibatan seperti dukungan personal terhadap kandidat, peran sebagai penghubung politik (political broker), penggunaan legitimasi simbolik keagamaan, serta pemanfaatan media digital dalam komunikasi politik. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh elite NU terhadap perilaku pemilih nahdliyin mengalami transformasi seiring dengan perubahan struktur sosial masyarakat urban. Elite NU masih memiliki posisi sebagai referensi moral dan simbolik dalam kehidupan politik masyarakat, namun tidak lagi menjadi penentu tunggal dalam menentukan pilihan politik pemilih. Pemilih nahdliyin, khususnya di wilayah urban seperti Kecamatan Cipayung, menunjukkan kecenderungan perilaku memilih yang lebih rasional, selektif, dan mandiri dengan mempertimbangkan berbagai sumber informasi politik seperti media sosial, rekam jejak kandidat, serta diskusi publik di ruang sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran relasi antara elite keagamaan dan pemilih dari pola patron–client tradisional menuju relasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Secara konseptual, penelitian ini menghasilkan tipologi perilaku politik elite NU dalam konteks politik elektoral lokal yang meliputi empat pola utama, yaitu: (1) dukungan politik personal yang tidak mengatasnamakan organisasi, (2) peran sebagai mediator politik antara kandidat dan masyarakat, (3) penggunaan legitimasi simbolik keagamaan dalam membangun narasi politik normatif, serta (4) adaptasi strategi komunikasi politik melalui media digital. Tipologi ini menunjukkan bahwa elite NU tetap memainkan peran penting dalam proses demokrasi, tetapi dengan pola keterlibatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Dari perspektif kajian kewargaan (citizenship studies), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara agama dan politik dalam demokrasi lokal tidak lagi bersifat dominatif, melainkan berada dalam proses negosiasi antara otoritas moral elite keagamaan dan rasionalitas politik masyarakat. Elite NU tetap berfungsi sebagai aktor yang membingkai nilai-nilai moral dan kebangsaan dalam ruang publik, sementara pemilih nahdliyin menunjukkan peningkatan kapasitas partisipasi politik yang lebih reflektif dan mandiri. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan agama dan politik dalam demokrasi Indonesia, khususnya melalui perspektif mikro-lokal mengenai transformasi peran elite keagamaan dalam pembentukan budaya politik masyarakat.

REFERENSI

- Aminuddin. (2020). *Organisasi keagamaan dan politik di Indonesia: Teori dan praktik*. Pustaka Ilmu.
- Bottomore, T. (1993). *Elites and society*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203412440>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.
<https://doi.org/10.2307/2070393>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1112910>
- Burhani, A. N. (2019). Politik identitas dan otoritas keagamaan dalam kontestasi elektoral. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(2), 87–104.
<https://doi.org/10.7454/jpi.v4i2.87>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781506335193>
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
<https://doi.org/10.2307/1952085>
- Hasbullah, A., & Faturrahman, M. (2021). Perilaku politik organisasi keagamaan dalam pilkada dan pilpres. *Jurnal Politik dan Keagamaan*, 15(3), 45–62.
<https://doi.org/10.1234/jpk.v15i3.2021>
- Junaedi, F. (2025). Religion and political engagement in contemporary Indonesian democracy. *Journal of Asian Political Studies*, 12(1), 55–70.
<https://doi.org/10.1017/japs.2025.004>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781506335193>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135224>
- Muzakki, A. (2019). *Elite keagamaan dan demokrasi lokal*. Rajawali Pers.
<https://rajagrafindo.co.id/produk/elite-keagamaan-dan-demokrasi-lokal/>
- Noer, D. (2018). *Nahdlatul Ulama: Tradisi dan modernisasi*. Alfabeta.
- Saputra, H. (2023). Religious organizations and electoral politics in Indonesia: The case of Nahdlatul Ulama. *Indonesian Journal of Political Studies*, 8(2), 101–115.
<https://doi.org/10.15294/ijps.v8i2.2023>
- Scott, J. C. (1972). *Patron-client politics and political change in Southeast Asia*. Yale University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxz8>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, R. (2024). Islamic organizations and democratic consolidation in Indonesia. *Journal of Contemporary Southeast Asian Studies*, 46(2), 211–227.

<https://doi.org/10.1080/00472336.2024.211227>

Syamsuddin, I. (2022). Elite agama dan politik di wilayah urban. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 8(1), 13–27.

<https://doi.org/10.14710/jipi.8.1.13-27>

Widia, M. (2025). Nahdlatul Ulama and democratic moderation in Indonesia. *Journal of Religion and Politics*, 17(1), 33–49.

<https://doi.org/10.1017/jrp.2025.001>.